

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan | Meningkatnya Nilai investasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penguatan citra sebagai daerah yang menjadi tujuan Penanaman Modal 2. Meningkatkan peluang Investasi 3. Melaksanakan Promosi Investasi secara terfokus dan inovatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kajian terhadap peluang investasi 2. Melaksanakan promosi secara massif dan tepat sasaran 3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Investasi Penanaman Modal 5. Fasilitasi kemudahan investasi |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal | 1. Melaksanakan fasilitas kemudahan berinvestasi | 1. Menyusun sistem informasi penanaman modal |
| Menurunnya tingkat pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja | 1. Melaksanakan Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja 2. Melaksanakan kerjasama dengan penyedia lapangan kerja | 1. Melaksanakan pendataan tenaga kerja dan kesempatan kerja 2. Melaksanakan Sosialisasi penempatan tenaga kerja 3. Peningkatan hubungan industrial, koordinasi dengan pengusaha dan pekerja . |
| Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif | | | |
| Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan | 1. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan | 1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan 2. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap SP dan SOP 5. Melaksanakan sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha |